

FAKTOR-FAKTOR PENENTU IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Jenis Sesi Paper: Full paper

R. Indra Sarjono Sipahutar

Universitas Sebelas Maret

r.indrasipahutar@student.uns.ac.id

Sutaryo

Universitas Sebelas Maret

star.piet@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of region own source revenue (PAD), capital expenditure, internal auditor capability, internal auditor expertise to the implementation of e-government on municipalities in Indonesia. This study used dependent variable like index ranking of e-government local government (PeGI) and so the independent variable used is region own source revenue, capital expenditure, internal auditor capability, internal auditor expertise. The sampling technique in this study is purposive sampling. The criteria are determined based on the index ranking of e-government local government (PeGI) issued by the Kemenkominfo. The criteria is divided into five dimensions, namely policies, institutions, infrastructure, applications and planning. Based on the criteria that have been established, there are 198 municipalities as sample. Data in this study is collected from the Local Government Financial Report (LKPD) in 2012-2014 and the index ranking of e-government implementation (PeGI) in 2012-2014. Data were analyzed using descriptive statistics, classical assumption test and multiple linear regression.

The results showed that political region own source revenue (PAD), capital expenditure, internal auditor capability have a effect on e-government implementation. However, internal auditor expertise not have a effect on e-government implementation in Indonesia.

Keywords: *e-government, region own source revenue, capital expenditure, capability*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, kapabilitas auditor internal, keahlian auditor internal terhadap implementasi *e-government* pemerintah daerah di Indonesia. penelitian ini menggunakan variabel dependen indeks pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) dan variabel independen pendapatan asli daerah, belanja modal, kapabilitas auditor internal, keahlian auditor internal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel dari indeks pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo. Kriteria tersebut dibagi ke dalam lima dimensi, yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Kemenkominfo, diperoleh sampel sebanyak 198 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012-2014 dan indeks pemeringkatan *e-government* Indonesia tahun 2012-2014. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, kapabilitas auditor internal berpengaruh terhadap implementasi *e-government* di Indonesia, sedangkan keahlian auditor internal tidak berpengaruh terhadap implementasi *e-government* di Indonesia

Kata Kunci: *e-government, pendapatan asli daerah, belanja modal, kapabilitas*

1. Pendahuluan

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* merupakan era baru dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan, kebijakan serta kegiatan pemerintah baik pemerintah pusat mau pun pemerintah daerah. Penerapan *e-government* diharapkan akan membawa dampak positif dalam meningkatkan perekonomian suatu negara seperti negara Indonesia yang sedang berusaha keluar dari status negara berkembang menjadi negara maju. Salah satu usaha meningkatkan perekonomian negara adalah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Sejalan dengan misi *good governance*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* diterbitkan dengan tujuan untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Menurut Nam (2014), terdapat lima kegunaan *e-government* dalam instansi pemerintahan, yaitu (1) kegunaan layanan: penggunaan layanan transaksional, (2) kegunaan informasi umum: pencarian informasi umum, (3) penyelidikan/riset kebijakan : pencarian informasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, (4) partisipasi : keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, (5) *co-creation*: menyusun kebijakan, informasi, dan layanan-layanan oleh pemerintah dan warga negara secara bersama-sama.

Tujuan penting dalam implementasi *e-government* adalah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat dicapai dengan adanya fasilitas teknologi informasi yang memadai dan tenaga yang ahli dalam mengerjakannya. Pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara berinteraksi antara sebuah lembaga dengan lembaga lainnya. Faktanya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintahan mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan cara pemerintah mengelola tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Implementasi *e-government* diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai cara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi kinerja (Chun *et al*, 2012).

Menurut Laswad et al (2005), akuntabilitas adalah kondisi di mana pemerintah daerah melakukan proses perencanaan, publikasi dan menyebarkan informasi rencana tahunan (informasi perkiraan) dan laporan keuangan yang telah diaudit dan persyaratan bahwa pemerintah daerah mengembangkan, menerapkan, dan memelihara strategi keuangan jangka panjang serta kebijakan investasi dan pinjaman kepada masyarakat. Bersamaan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat karena pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan menjadikan sistem informasi di dalam pemerintah daerah terhubung secara *online* sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang cepat, tepat, mudah, dan lebih murah.

Cikal bakal pelaksanaan implementasi *e-government* di Indonesia telah dimulai sejak 17 tahun lalu yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang No.43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang melahirkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Namun, di tengah-tengah berkembangnya penerapan *e-government* khususnya pada pemerintah daerah masih terdapat berbagai kendala untuk mendukung dan mencapai keberhasilan penerapan *e-government*. Beberapa kendala tersebut antara lain berasal dari faktor internal dan faktor eksternal pemerintah itu sendiri. Menurut Ndou (2004) ada banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan *e-government* yang mengarah ke memperlambat dan kompleksitas dalam menerapkan *e-government* di negara-negara berkembang. Hambatan dalam penerapan *e-government* antara lain infrastruktur TIK, isu-isu kebijakan, perubahan dalam manajemen dan kendala-kendala dalam kemitraan dan kolaborasi. Para peneliti telah mengklasifikasikan tantangan *e-government* pada negara-negara berkembang ke dalam berbagai kategori, seperti strategi, teknologi, kebijakan, dan organisasi (Lam, 2005). Menurut Obeidat dan Abu-Shanab (2010) hambatan penerapan *e-government* adalah peraturan/hukum dan sumber daya manusia. Hambatan penerapan *e-government* lainnya adalah terkait hal teknis, nasional, sosial dan organisasi (Kanaan, 2009).

Di Indonesia, terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam implementasi *e-government* yaitu hambatan di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaraan situs web pemerintah daerah, kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, dan belum meratanya

pemahaman masyarakat tentang penggunaan *e-governement* (Sosiawan, 2008). Menurut Satriya (2006), kendala penerapan *e-government* di Indonesia adalah mengenai masalah aplikasi *e-government* dan infrastruktur, faktor kelembagaan, regulasi, dan kebijakan, serta rendahnya pemahaman tentang *e-government*.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai implementasi *e-government* telah dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara garis besar, penelitian terdahulu mengenai implementasi *e-government* dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok tema, yaitu efek pelaksanaan *e-government* terhadap suatu output, evaluasi terhadap penerapan *e-government*, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *e-government*.

Penelitian terkait efek pelaksanaan *e-government* telah dilakukan baik di di dalam negeri maupun di luar negeri. Misalnya, Elbahnasawy (2014) meneliti tentang dampak penerapan *e-government* dan pengadopsian internet terhadap penurunan korupsi. Gathungu dan Mungai (2012) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi strategi implementasi *e-government* dan dampaknya terhadap kinerja sektor publik di Kenya. Penelitian lainnya terkait efek penerapan implementasi *e-government* dilakukan di Indonesia, misalnya studi penerapan *e-government* di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik (Hardjaloka, 2014).

Adapun penelitian mengenai evaluasi terhadap implementasi *e-governement* telah dilakukan di luar negeri dan di dalam negeri. Contohnya, Chatfield dan Alhujran (2009) menganalisis tentang perbandingan tingkat perkembangan penggunaan *e-government* pada negara-negara Arab. Penelitian yang lain meneliti mengenai motivasi dan temuan-temuan terkait penerapan *e-government* pada pemerintah (Chun *et al*, 2012). Penelitian lain melakukan penelitian terkait kegunaan *e-government*, misalnya Nam (2014) meneliti tentang tingkat penggunaan *e-government* oleh pemerintah dengan menganalisa data Survei Online Pemerintah yang dikeluarkan oleh Pew Internet and American Life Project. Penelitian lainnya meneliti evaluasi penerapan *e-government* pada pemerintah daerah di Indonesia, contohnya Sosiawan (2008) meneliti tentang implementasi *e-government* pada situs web pemerintah daerah di Indonesia.

Topik penelitian yang banyak dilakukan mengenai implementasi *e-government* adalah penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *e-government*. Misalnya, Alwazhir & Zheng (2014) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *e-government* di Yaman. Al-Naimat *et al* (2013) meneliti mengenai implementasi *e-government* di Jordan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Cinca *et al* (2008) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *e-government* di 92 kota di Spanyol. Di Indonesia, penelitian serupa juga telah dilakukan dan menfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *e-government* pada pemerintah daerah. Martani (2010) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *e-government* pada pemerintah provinsi di Indonesia.

Dari kategori penelitian di atas, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *e-government* menjadi topik penelitian yang menarik. Hal ini didasarkan bahwa pada hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten baik pada faktor non-keuangan maupun faktor keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian mengenai pengaruh faktor non-keuangan, misalnya Martani (2010) menemukan bahwa variabel tipe pemerintah daerah hasilnya tidak berpengaruh signifikan. Selain itu faktor keuangan seperti pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten di mana penelitian dan Martani (2010) menemukan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan. Sebaliknya penelitian Adhi dan Suhardi (2010) menemukan bahwa implementasi *e-government* tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selain hasil pengukuran variabel yang tidak konsisten, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan indeks pemeringkatan *e-government* (PeGI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini lebih formal dikeluarkan oleh kementerian teknis terkait sehingga lebih valid dibanding dengan ukuran dari penelitian sebelumnya. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penentu tingkat keberhasilan implementasi *e-government* di Indonesia. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat memberikan tambahan literatur penerapan implementasi *e-government* pada pemerintah dan kontribusi bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan keberhasilan penerapan *e-government* pada pemerintah di Indonesia.

2. Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis

Teori Organisasi

Organisasi merupakan sarana untuk mewujudkan kebersamaan dan sebagai wadah untuk menyampaikan ide atau gagasan sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. Organisasi dapat dijadikan sebagai ajang untuk bersosialisasi dan bekerja sama dengan rasional dan sistematis. Teori organisasi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengkoordinasi orang-orang di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu (Mc Auley *et al*, 2007). Sementara menurut Pugh (1977) dalam Mc Auley *et al* (2007) mendefinisikan bahwa teori organisasi adalah suatu studi tentang struktur, fungsi, dan kinerja organisasi dan perilaku orang-orang dan kelompok yang berada di dalamnya. Teori organisasi juga mempelajari bagaimana organisasi berfungsi, bagaimana seharusnya organisasi diatur dan bagaimana pengaruh faktor-faktor baik internal maupun eksternal terhadap organisasi.

Organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal mempunyai kecenderungan pada penerapan tipe sistem organisasi terbuka (Patrick, 2007). Perbedaan antara sistem organisasi tertutup dengan organisasi terbuka adalah bahwa pada organisasi tertutup banyak berpengaruh pada administrasi publik, sedangkan organisasi terbuka lebih mengarah pada sistem administrasi perusahaan. walaupun pada akhir-akhir ini banyak perubahan yang terjadi, namun administrasi publik juga menggunakan sistem terbuka. Karakteristik sistem organisasi terbuka merupakan organisasi yang mudah menyesuaikan dengan lingkungannya, sehingga inovasi organisasi mampu berkembang pesat pada sistem ini. Karakteristik pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan organisasi sistem terbuka. Hal ini akan menghasilkan inovasi organisasi yang berkaitan dengan struktur organisasi dan lingkungan eksternal organisasi.

Menurut Patrick (2007), organisasi sistem terbuka dapat berinteraksi dengan lingkungan eksternal yang terkait dengan inovasi. Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel independen. Karakteristik tersebut terdiri atas tiga kategori yaitu (1) budaya organisasi, (2) struktur organisasi, dan (3) lingkungan eksternal. Budaya organisasi diproksikan dengan kecenderungan berinovasi dan tanggung jawab konstituen. Struktur organisasi diproksikan dengan spesialisasi kerja, diferensial fungsi, intensitas administrasi, ketersediaan sumber daya dan ukuran organisasi. Sementara lingkungan eksternal diproksikan dengan

debt financing dan *intergovernmental revenue*, sehingga penelitian ini menggunakan struktur dan lingkungan eksternal organisasi sebagai indikator karakteristik pemerintah daerah.

Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pengertian pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah yang menandai sebuah daerah tersebut dan dapat membedakannya dengan daerah yang lain. Patrick (2007) dalam penelitiannya menggunakan budaya organisasi, struktur organisasi dan lingkungan eksternal sebagai proksi dari variabel karakteristik pemerintah daerah di Pennsylvania. Suhardjanto *et al* (2010) menggunakan struktur organisasi dan lingkungan eksternal dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah, struktur organisasi diproksikan dengan ukuran daerah, *wealth*, *functional differentiation*, *age*, dan latar belakang pendidikan, sementara lingkungan eksternal diproksikan dengan *municipality debt financing* dan *intergovernmental revenue*. Dengan demikian, variabel ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD dan status daerah sebagai proksi dari variabel karakteristik pemerintah daerah dalam penelitiannya.

Kapabilitas Auditor Internal

Menurut Peraturan Kepala BPKP No. PER-1633/K/JF/2011, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah merupakan:

“kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.”

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari segi kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, dan sumber daya manusia (SDM).

Kapabilitas APIP diukur dengan *Internal Audit Capability Model (IACM)* sesuai dengan Perka BPKP No. PER-1633/K/JF/2011, yang merupakan alat bantu dalam menyusun kerangka kerja untuk memperkuat peran APIP melalui beberapa langkah perubahan yang diorganisasikan dalam lima level kapabilitas yaitu (1) *initial*, (2) *infrastructure*, (3) *integrated*, (4) *managed*, dan (5) *optimizing*.

Keahlian Auditor Internal

Keahlian adalah suatu minat atau bakat yang harus dimiliki oleh seseorang, dengan keahlian yang dimilikinya memungkinkan untuk dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas secara baik dengan hasil yang maksimal. Keahlian seseorang dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal misalnya dari pengalaman-pengalaman dalam bidang tertentu. Pengalaman-pengalaman tersebut dapat diperoleh dari pelaksanaan tugas-tugas dalam pekerjaan, dan pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan keahlian seseorang.

Pada pemerintah daerah, keahlian diperlukan oleh aparat pengawas intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor internal pemerintah. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.Pan/03/2008 bahwa seorang auditor/pemeriksa harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pimpinan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus yakin bahwa latar belakang pendidikan dan kompetensi teknis auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pimpinan APIP wajib menciptakan kriteria yang memadai tentang pendidikan dan pengalaman dalam mengisi posisi auditor di lingkungan APIP. Menurut Sutaryo *et al*, inspektorat pemerintah daerah melaksanakan pengawasan intern terhadap

pemerintah daerah ditentukan oleh atribut auditornya seperti jenjang jabatan dan peran dalam organisasi pemerintah. Jika jenjang jabatan dan peran tinggi, maka akan mempunyai kemampuan yang tinggi sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh organisasi (Sultana *et al*, 2015).

Implementasi

Implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan alat (sarana) untuk memperoleh hasil. Di dalam kebijakan publik, implementasi kebijakan publik diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana/alat untuk mencapai tujuan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. Meter dan Carl (1975) merumuskan implementasi ini adalah sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu, pejabat – pejabat, atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

E-government

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government diterbitkan dengan tujuan untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Pengembangan *e-government* dilakukan dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

The World Bank Group mendefinisikan *e-government* sebagai berikut : “*e-government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *Wide Area Network*, Internet dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan. Sementara Muhannad (2014)

mendefinisikan bahwa *e-government* berarti penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada warga. Walaupun *e-government* memberikan manfaat besar dan sinergi kepada pemerintah dan masyarakat, akan tetapi tetap menghadapi banyak kendala dan tantangan. Oleh karena itu, selalu ada sejumlah faktor penentu keberhasilan dan risiko yang terkait dengan implementasi *e-government*.

Menurut Reddick (2004) terdapat tiga level pertumbuhan *e-government* dan jenis hubungan pemerintah, yaitu *Government to citizen* (G2C), *Government to government* (G2G), dan *Government to business* (G2B). *Government to citizen* (G2C) adalah tingkatan di mana pemerintah menyediakan informasi tentang pemerintahan dan aktivitas-aktivitas terkait kebijakan bagi masyarakat seperti siaran langsung rapat pemerintah dan juga pemerintah menyediakan layanan, *database*, formulir online untuk mendukung transaksi online bagi masyarakat seperti pembayaran pajak online. *Government to government* (G2G) merupakan tingkatan di mana pemerintah menyediakan informasi kepada bagian/tingkat pemerintah lainnya dan pegawainya, seperti intranet yang menyediakan informasi bermanfaat dan juga menyediakan layanan, *database*, formulir online untuk mendukung transaksi online bagi tingkat pemerintah dan pegawai lainnya, contohnya menyediakan pelatihan online. Dan *Government to business* (G2B) adalah tingkatan di mana pemerintah menyediakan informasi untuk bisnis dalam bidang pemerintahan, seperti pengadaan persediaan kantor secara online dan juga menyediakan layanan, *database*, dan formulir online untuk mendukung transaksi bisnis dengan pemerintah, contohnya pengadaan pembelian persediaan kantor secara online.

Menurut Nam (2014), penggunaan *e-government* dalam instansi pemerintahan dapat dibagi ke dalam lima jenis yaitu kegunaan layanan: layanan transaksional, kegunaan informasi umum : pencarian informasi umum, peyelidikan/ riset kebijakan pemerintah, partisipasi: keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah, dan *co-creation*: penyusunan kebijakan, informasi, dan layanan-layanan oleh pemerintah dan masyarakat. Sementara itu di Indonesia, tujuan pengembangan *e-government* yang terdapat pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat ;

pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional ; pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara ; dan pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

2.1. Pendapatan Asli Daerah dan e-government

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Implementasi desentralisasi fiskal yang bertolak ukuran dari pendapat asli daerah harus diupayakan secara optimal karena pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Kim (2007) menyatakan bahwa kinerja *e-government* ditentukan oleh kesejahteraan ekonomi, pendidikan, urbanisasi, kebebasan rakyat, efektivitas pemerintahan, dan interaksi antara penggunaan internet dan kesejahteraan ekonomi Hal ini dapat diartikan bahwa jika kesejahteraan ekonomi daerah tinggi , maka pemerintah daerah mempunyai biaya yang cukup untuk melayani masyarakatnya melalui implementasi *e-government*, karena implementasi *e-government* diharapkan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan biaya besar. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1 = *Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap implementasi e-government pemerintah daerah di Indonesia.*

2.2. Belanja Modal dan e-government

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran

untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Untuk mendukung implementasi *e-government* diperlukan pengadaan infrastruktur yang memadai, hal ini untuk mengurangi salah satu hambatan dalam implementasi *e-government* yaitu kurangnya alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diperlukan dalam penerapan *e-government*. Dengan adanya peningkatan belanja modal maka diharapkan akan menambah alokasi belanja modal untuk pengadaan peralatan dan mesin TIK. Cinca *et al* menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan *e-government* yaitu sumber daya pemerintah kabupaten/kota, politikus dan lingkungan. Sumber daya pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan karakteristik spesifik seperti ukuran pemerintah, kekuatan finansial dan kapasitas teknologi. Sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai akan mendukung tingkat implementasi *e-government*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H2 = *Jumlah belanja modal berpengaruh positif terhadap implementasi e-government pemerintah daerah di Indonesia.*

3. *Kapabilitas auditor internal dan e-government*

Kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) menunjukkan kemampuan APIP terkait kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya, manusia APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Kapabilitas APIP terdiri atas lima level, yaitu *initial, infrastructure, integrated, managed, dan optimizing* (Perka BPKP 1633,2011). Semakin tinggi level yang diperoleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) maka akan semakin baik kinerja APIP tersebut. Menurut *The International for the Professional Practice of Internal Auditing*, peran yang dimainkan oleh auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama yaitu jasa *assurance* dan jasa konsultasi. Jasa *assurance* merupakan penilaian objektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain, sedangkan jasa konsultasi merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien. Melalui jasa konsultasi APIP sebagai auditor internal pemerintah daerah berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi level IACM yang diperoleh oleh APIP artinya semakin tinggi kemampuan APIP dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan LKPD

sehingga LKPD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah semakin andal dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan implementasi *e-government* yaitu menyediakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah baik informasi keuangan maupun non keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3 = *Kapabilitas auditor internal berpengaruh positif terhadap implementasi e-government pemerintah daerah di Indonesia.*

4. Keahlian auditor internal dan e-government

Keahlian aparat pengawas intern pemerintah (APIP) menunjukkan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan oleh auditor internal pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Inspektorat pemerintah daerah melaksanakan pengawasan intern terhadap pemerintah daerah ditentukan oleh atribut auditornya seperti jenjang jabatan dan peran dalam organisasi pemerintah (Sutaryo *et al*, 2015) Semakin tinggi tingkat keahlian auditor maka akan semakin baik kinerja dari APIP tersebut. Aparat pengawas intern pemerintah (APIP) harus mempunyai latar belakang pendidikan dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan auditnya. Keahlian auditor ini penting untuk diperhatikan karena tingkat keahlian auditor yang tinggi akan memberikan kinerja yang baik pula terutama dalam hal penciptaan transparansi dan akuntabilitas publik, yang merupakan tujuan diterapkannya *e-government*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H4 = *Keahlian auditor internal berpengaruh positif terhadap implementasi e-government pemerintah daerah di Indonesia.*

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia yang laporan keuangannya tahun 2012-2014. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari penelitian. Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel dari indeks pemingkatan *e-government* pemerintah kabupaten dan kota tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dalam lima kriteria, yaitu dimensi kebijakan, dimensi kelembagaan, dimensi

infrastruktur, dimensi aplikasi dan dimensi perencanaan. Dimensi penilaian *e-government* tersebut ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipublikasikan dalam situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu www.kominfo.go.id dan www.pegi.layanan.go.id. *Sample frame* dalam penelitian ini adalah daftar nama pemerintahan kabupaten dan kota yang terdapat dalam daftar indeks pemeringkatan *e-government* tahun 2012-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 198 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

TABEL 1
Data dan Sumber Data

Data	Sumber Data
Indeks Pemeringkatan <i>e-government</i> Indonesia (PeGI)	Kementerian Informasi dan Komunikasi
Realisasi pendapatan asli daerah (PAD)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)
Realisasi belanja modal	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)
Kapabilitas auditor internal	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Keahlian auditor internal	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

3.2. *Variabel dan Pengukuran Variabel*

Variabel dependen yang digunakan adalah rata-rata indeks pemeringkatan *e-government*. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu total pendapatan asli daerah (PAD), total belanja modal, kapabilitas, dan keahlian. Lebih lanjut, variabel dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

TABEL 2
Variabel dan Pengukuran Variabel

Nama	Akronim	Pengukuran
Variabel Dependen		
Indeks Peningkatan <i>e-government</i>	EGOV	Nilai rata-rata indeks peningkatan <i>e-government</i> .
Variabel Independen		
Pendapatan Asli Daerah	REVENUE	Ln (Total realisasi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten atau kota)
Belanja Modal	EXPEND	Ln (Total realisasi belanja modal kabupaten atau kota)
Kapabilitas	CAPABILITY	Hasil assesment <i>internal control</i> oleh BPKP
Keahlian	EXPERTISE	Jumlah total keahlian (penyelia, pelaksana lanjutan dan pelaksana dibagi dengan jumlah auditor pada kabupaten/kota.
Variabel Kontrol		
Tipe Pemerintah Daerah	TYPE	Variabel <i>dummy</i> dengan angka 0 untuk tipe pemerintah kabupaten dan angka 1 untuk pemerintah kota.
Lokasi Pemerintah Daerah	GEO	Variabel <i>dummy</i> dengan angka 0 untuk lokasi pemerintah kabupaten/kota di Luar Jawa dan angka 1 untuk pemerintah kabupaten/kota di Jawa.

3.3. Metode dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengalokasian belanja bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. metode yang digunakan adalah regresi berganda yang berfungsi untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen total PAD, belanja modal, level kapabilitas, level keahlian, karakteristik pemerintah kabupaten/kota terhadap implementasi *e-government* pada 198 kabupaten atau kota di Indonesia.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda sebagai berikut

$$\beta(EGOV) = \beta_0 + \beta_1(REVENUE) + \beta_2(EXPEND) + \beta_3(CAPABILITY) + \beta_4(EXPERTISE) + \beta_5(TYPE) + \beta_6(GEO) + \epsilon_i$$

Keterangan:

EGOV	= Indeks peningkatan <i>e-government</i> .
REVENUE	= Total pendapatan asli daerah (PAD)
EXPEND	= Total belanja modal daerah
CAPABILITY	= Level kapabilitas auditor internal
EXPERTISE	= Level keahlian auditor internal
TYPE	= Tipe pemerintah daerah
GEO	= Lokasi pemerintah daerah

4. Hasil Analisis Dan Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif

TABEL 3
Statistik Deskriptif dan Korelasi

	EGOV	REVENUE	EXPEND	CAPABILITY	EXPERTISE	TYPE	GEO
Minimum	1	2677	32341	1	0	0	0
Maximum	3,53	2791580	1817067	2	1	1	1
Mean	1,86242	204707,3939	283138,6010	1,10606	0,16561	0,24242	0,3737
Std. Deviation	0,41405	360383,6661	233034,7865	0,308696	0,24625	0,429636	0,4850
N	198	198	198	198	198	198	198
Correlations	EGOV	REVENUE	EXPEND	CAPABILITY	EXPERTISE	TYPE	GEO
EGOV	1,000						
REVENUE	,475**	1,000					
EXPEND	,382**	,661**	1,000				
CAPABILITY	,190**	-0,001	-0,077	1,000			
EXPERTISE	0,085	0,109	0,037	,168*	1,000		
TYPE	,219**	,173**	-0,026	-0,003	0,039	1,000	
GEO	,413**	,287**	,168*	,310**	0,084	-0,023	1,000
	0,000	0,000	0,018	0,000	0,237	0,749	

Keterangan: EGOV: implementasi e-government: REVENUE: pendapatan asli daerah: EXPEND: total belanja modal daerah : CAPABILITY:kapabilitas inspektorat daerah: EXPERTISE: keahlian inspektorat daerah: TYPE: tipe pemerintah daerah: GEO: geografis pemerintah daerah : ** Signifikansi pada level 1% : * Signifikansi pada level 5%

TABEL 3 menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) dalam penelitian ini adalah sebanyak 198. Dari 198 sampel tersebut variabel independennya adalah PAD, BELANJA MODAL, KAPABILITAS dan KEAHLIAN dengan variabel kontrol TIPE PEMDA dan GEOGRAFIS serta variabel dependennya EGOV. Hasil statistik deskriptif pada tabel menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan 198 sampel. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai minimum pada variabel tingkat implementasi *e-government* (PeGI) sebesar 1,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng dan nilai *e-government* tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya dan Kota Pekalongan sebesar 3,53. Sementara nilai rata-rata tingkat implementasi *e-government* sebesar 1,86242. Nilai minimum pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2.677 (dalam jutaan rupiah) dimiliki oleh Kabupaten tertinggi dan nilai maksimum pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2.791.580 (dalam jutaan rupiah) terdapat pada Kota Surabaya, sedangkan nilai rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar Rp204.707,3939 (dalam jutaan rupiah). Semakin tinggi nilai PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Nilai minimum belanja modal sebesar Rp32.341 (dalam jutaan rupiah) dimiliki oleh Kota Probolinggo dan nilai maksimum belanja modal sebesar Rp1.817.067 (dalam jutaan rupiah) dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kertanegara, sedangkan nilai rata-rata belanja modal sebesar Rp283.138,6010 (dalam jutaan rupiah). Semakin tinggi nilai belanja modal maka semakin tinggi pula alokasi belanja untuk pengadaan infrastruktur *e-government*. Variabel kapabilitas memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 2, sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 1,10606. Artinya sebagian besar tingkat kapabilitas auditor internal pemerintah daerah di Indonesia hanya mencapai level 1 atau level *initial* dan level 2 atau level *infrastruktur*, dalam level ini auditor internal Pemda belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan belum dapat mencegah korupsi (Perka BPKP 1633, 2011). Variabel keahlian memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1, sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 0,16561. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat keahlian auditor internal pemerintah daerah di Indonesia masih berada pada level yang rendah. Tipe pemerintah daerah akan diberi angka 0 jika status daerah adalah kabupaten dan angka 1 jika status pemerintah daerah adalah kota. Dan juga variabel geografis pemerintah daerah akan diberi angka 0 jika berada di luar pulau Jawa dan angka 1 jika berada di pulau Jawa. Hal ini tentunya berhubungan antara total pendapatan asli daerah (PAD),

belanja modal, kapabilitas, serta keahlian auditor internal sebagaimana terlihat dari nilai korelasi yang signifikan seperti tersaji dalam TABEL 3 di atas.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolonieritas, dan uji autokorelasi telah dilakukan dan data terdistribusi normal dan tidak terjadi gangguan asumsi klasik sehingga pengujian hipotesis dengan regresi berganda dapat dilakukan

4.3. Uji Hipotesis dan Pembahasan

Untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda.

TABEL 4
Pengujian Hipotesis

	1	2	3	4	5
Constant	1,640 0,000 ^a	1,527 0,000 ^a	1,582 0,000 ^a	1,666 0,000 ^a	1,399 0,000 ^a
REVENUE	5,728 0,000 ^a				2,818 0,005 ^a
EXPEND		5,472 0,000 ^a			2,482 0,014 ^b
CAPABILITY			1,021 0,308		1,919 0,057 ^c
EXPERTISE				0,645 0,520	0,020 0,984
TYPE	2,762 0,000 ^a	4,003 0,000 ^a	3,62 0,000 ^a	3,588 0,000 ^a	3,189 0,002 ^a
GEO	5,126 0,006 ^a	6,076 0,000 ^a	5,976 0,000 ^a	6,53 0,000 ^a	4,397 0,000 ^a
F Test	32,601	31,373	18,977	18,708	18,332
Sig	0,000 ^a	0,000 ^a	0,000 ^a	0,000 ^a	0,000 ^a
R Square	0,335	0,327	0,227	0,224	0,365
Adjusted R Square	0,325	0,316	0,215	0,212	0,345
N	198	198	198	198	198

Keterangan: EGOV: implementasi e-government: REVENUE: pendapatan asli daerah: EXPEND: total belanja modal daerah : CAPABILITY:kapabilitas inspektorat daerah: EXPERTISE: keahlian inspektorat daerah: TYPE: tipe pemerintah daerah: GEO: geografis pemerintah daerah

^a Signifikansi pada sig < 1% : ^b Signifikansi pada sig < 5%: ^c Signifikansi pada sig <10%

Hasil pengujian regresi sederhana yang ditunjukkan pada TABEL 4 menyatakan bahwa nilai *adjusted R Square* sebesar 0,345 artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel

dependennya hanya sebesar 34,5%. Sedangkan 65,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Sementara uji signifikansi simultan atau yang disebut dengan uji F digunakan untuk melihat apakah model regresi layak (*fit*) atau tidak. Dari tabel di atas menunjukkan nilai F hitung untuk persamaan regresi sederhana ini sebesar 18,332 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi berada di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa model regresi layak/*fit*.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila *probability value (p-value)* menunjukkan nilai lebih kecil dari 10%. Berdasarkan tabel di atas tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima. Artinya total pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap implementasi *e-government*. Hasil dari penelitian ini sama dengan penjelasan hipotesis bahwa semakin tinggi total pendapatan asli daerah (PAD) maka akan semakin tinggi tingkat implementasi *e-government*. Hal ini sejalan dengan penelitian penelitian Martani (2010) menemukan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap *e-government*. Hasil pengujian menunjukkan hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima. Artinya bahwa jumlah belanja modal daerah berpengaruh positif terhadap implementasi *e-government*. Hasil ini sama dengan hipotesis bahwa semakin tinggi jumlah belanja modal maka akan semakin tinggi tingkat implementasi *e-government*. Hal ini dikarenakan bahwa semakin tinggi jumlah belanja modal maka akan semakin tinggi juga bagian dari belanja modal yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan implementasi *e-government*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima. Artinya bahwa level kapabilitas auditor internal pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap implementasi *e-government*. Hasil dari penelitian sesuai dengan penjelasan dalam pengembangan hipotesis bahwa semakin tinggi level kapabilitas auditor internal maka akan semakin tinggi tingkat implementasi *e-government* pemerintah daerah. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 dalam penelitian ini ditolak. Artinya bahwa keahlian auditor internal pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap implementasi *e-government*. Variabel tipe pemerintah daerah dan geografis pemerintah daerah sebagai variabel kontrol menunjukkan bahwa tipe pemerintah daerah yang digambarkan dengan tipe pemerintahan kota dan kabupaten dan geografis pemerintah daerah yang digambarkan

dengan lokasi Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa berpengaruh positif terhadap implementasi *e-government* pemerintah daerah di Indonesia.

4.4. Pengujian Tambahan

Pengujian ini dilakukan dengan menginteraksikan antar variabel pendapatan asli daerah, belanja modal, kapabilitas auditor internal, dan keahlian auditor internal dengan tujuan untuk mengidentifikasi konsistensi hasil pengujian per variabel terhadap implementasi *e-government*. Hasil pengujian ini dapat dilihat dalam TABEL 5 berikut ini.

TABEL 5
Pengujian Hipotesis (Tambahan)

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Constant	1,570 0,000 ^a	1,566 0,000 ^a	1,494 0,000 ^a	1,482 0,000 ^a	1,637 0,000 ^a	1,636 0,000 ^a	1,358 0,000 ^a	1,329 0,000 ^a	1,519 0,000 ^a	1,519 0,000 ^a	1,581 0,000 ^a	1,585 0,000 ^a
REVENUE	2,795 0,006 ^a	2,804 0,006 ^a	5,898 0,000 ^a	5,806 0,000 ^a	5,676 0,000 ^a	5,660 0,000 ^a						
EXPEND	2,297 0,023 ^b	2,270 0,024 ^b					5,715 0,000 ^a	5,553 0,000 ^a	5,447 0,000 ^a	5,429 0,000 ^a		
CAPABILITY			1,698 0,091 ^c	1,731 0,085 ^c			1,881 0,061 ^c	1,932 0,055 ^c			0,934 0,352	0,941 0,348
EXPERTISE					0,225 0,822	0,209 0,835			0,557 0,578	0,550 0,583	0,498 0,619	0,525 0,600
REV_EXP		0,645 0,519										
REV_CAP				0,638 0,524								
REV_EXPERT						0,157 0,875						
EXP_CAP								0,950 0,343				
EXP_EXPERT										0,013 0,990		
CAP_EXPERT												-0,354 0,724
TIPE PEMDA	3,183 0,002 ^a	3,203 0,002 ^a	2,736 0,007 ^a	2,752 0,006 ^a	2,749 0,007 ^a	2,746 0,007 ^a	4,028 0,000 ^a	4,045 0,000 ^a	3,969 0,000 ^a	3,951 0,000 ^a	3,589 0,000 ^a	3,590 0,000 ^a

GEOGRAFIS	5,283	5,245	4,32	4,257	5,092	5,073	5,156	5,099	6,001	5,966	5,943	5,937
	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a
<i>F Test</i>	26,308	21,066	25,409	20,346	24,344	19,381	24,723	19,949	23,524	18,721	14,24	11,365
<i>Sig</i>	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a	0,000^a
<i>R Square</i>	0,353	0,354	0,345	0,346	0,335	0,335	0,339	0,342	0,328	0,328	0,228	0,228
<i>Adjusted R Square</i>	0,339	0,337	0,331	0,329	0,322	0,318	0,325	0,325	0,314	0,31	0,212	0,208
N	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198

Keterangan: EGOV: implementasi e-government: REVENUE: pendapatan asli daerah: EXPEND: total belanja modal daerah : CAPABILITY:kapabilitas inspektorat daerah: EXPERTISE: keahlian inspektorat daerah: TYPE: tipe pemerintah daerah: GEO: geografis pemerintah daerah : ^a Signifikansi pada sig < 1% : ^b Signifikansi pada sig < 5%: ^c Signifikansi pada sig <10%

TABEL 5 menunjukkan hasil bahwa semua persamaan regresi fit untuk digunakan terbukti dengan nilai F test dan signifikansi seluruh persamaan regresi kurang dari 5%. Hasil regresi 6-17 mengindikasikan bahwa hasil untuk variabel REVENUE, EXPENDITURE, CAPABILITY, dan EXPERTISE tidak konsisten berpengaruh terhadap implementasi *e-government* baik secara individu maupun ketika diinteraksikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang digunakan kurang sensitif terhadap implementasi *e-government* dibutuhkan pengembangan lebih lanjut mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, kapabilitas, dan keahlian terhadap implementasi *e-government* pemerintah daerah di Indonesia. Hasil dari penelitian atas pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, kapabilitas, dan keahlian terhadap implementasi *e-government* pemerintah daerah di Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, dan kapabilitas berpengaruh terhadap implementasi *e-government* pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan keahlian tidak berpengaruh terhadap implementasi *e-government* pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya karakteristik pemerintah daerah berupa faktor keuangan dan non-keuangan pemerintah daerah, dan kapabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait dengan implementasi *e-government*, sehingga pemerintah daerah penting untuk memenuhi alokasi keuangan dan sumber daya manusia yang memadai agar dapat melakukan implementasi *e-government* yang lebih baik.

Penelitian ini menggunakan sumber data yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun tidak semua kabupaten atau kota di Indonesia terdapat dalam data yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut, sehingga data kurang representative. Nilai *adjusted R²* sebesar 0,345. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 34,5% variasi dari implementasi *e-government* pemerintah daerah dapat diterangkan oleh variabel dalam penelitian ini, sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel-variabel lain. Penelitian selanjutnya sebaiknya mencakup semua

pemerintah daerah di Indonesia agar hasil penelitian bisa lebih digeneralisasi. Penelitian yang akan datang sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya faktor politik, sumber daya manusia (SDM) aparatur negara, faktor sosial dan kultur masyarakat, ketersediaan infrastruktur TIK, reformasi birokrasi dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Al-Wazir, Ali A dan Zhao Zheng, 2014. Factors Influencing E-government Implementation in Least Developed Countries: A Case Study of Yemen. *Developing Country Studies*. 4(7). Pp 20-29.
- Al-Naimat, Ali M et al, 2014. The Critical Success Factors For E-Government Implementation In Jordan. *Proceedings of the 4th International Conference on Computing and Information 2013 Sarawak*.
- Cinca, Carlos Serrano et al, 2009. Determinants of E-Government Extension. *Online Information Review*. 33 (3). Pp 476-498.
- Chatfield, Akemi Takeoka dan Omar Alhujran, 2009. A Cross-Country Comparative Analysis of E-Government Service Delivery among Arab Countries. *Information Technology for Development*. Vol. 15 (3). pp 151-17.
- Chun et al, 2012. Collaborative E-government. *Transforming Government: People, Process and Policy*. 6(1) pp.5-12.
- Elbahnasawy, Nasr G, 2014. E-Government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical Investigation. *Word Development* .Vol.57,pp.114-126.
- Gathungu, James dan Alfred N. Mungai, 2012. Contextual Factors Affecting E-Government Strategy Implementation and Its Impact on Public Sector Performance in Kenya. pp. 143-157.
- Ghozali, I, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Hardjaloka, Loura, 2014. Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik. *Jurnal Rechtsvinding*. 3(3). 435-452.
- Kanaan, R, 2009. *Making sense of E-government Implementation in Jordan: A Qualitative Investigation*. De Montfort University, United Kingdom.
- Kim, Chon-Kyun, 2007. *A Cross-national Analysis of Global E-Government*. Department of Social Sciences, Texas A&M University, Corpus Christi.
- Lam, W, 2005. Barriers to E-Government Integration. *Journal of Enterprise Information Management*: 18(5), 511-530.
- Laswad, Fawzi et al, 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy* 24. 101-12.
- Martani, Dwi dan Annisa Liestiani. 2010. *Disclosure of Local Government Financial Statement in Indonesia*. University of Indonesia. Depok.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975. *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society* 6. London: Sage.
- Mc Auley et al, 2007. *Organization Theory: Challenges and Perspectives*. Prentice Hall.
- Nam, Taewoo, 2014. *Determining The Type of E-Government Use*. Government Information Quarterly.
- Ndou, V, 2004. E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges. *EJISDC*,18(1),1-24.
- Obeidat, R. A. dan Abu-Shanab, E. A. (2010). Drivers of E-Government and E-Business in Jordan. *Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence*, 2(3), 204.
- Patrick, Patricia A, 2007. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Ph.D. Dissertation. The Pennsylvania State University, United States-Pennsylvania.
- Reddick, C. G., 2004. A Two Stage Model of E-Government Growth: Theories and Empirical Evidence for U.S. Cities. *Government Information Quarterly*, 21(1), 51-64.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- _____. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011. Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- _____. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- _____. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Sekaran, Uma, 2006. *Research Methods for Business. Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Penerbit Salemba.
- Sosiawan, Edwi Arief, 2008. Evaluasi Implementasi E-Government pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia : Perspektif Content dan Manajemen. *Seminar Nasional Informatika 2008 UPN Veteran Yogyakarta*.
- Suhardjanto et al, 2010. Influence of Parliament Characteristics toward Mandatory Accounting Disclosure Compliance in Indonesia. *Laporan Penelitian*. LP2M UNS
- Sultana, N., Singh, H., dan Mitchel, V., Z, 2015. Audit Committee Characteristics and Audit Report Lag. *International Journal of Auditing*. 119: 72–87.
- Sutaryo et al, 2015. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Bukti Peran Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Di Indonesia. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.